

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1). Proses pembentukan potensi diri peserta didik salah satunya dibentuk melalui pendidikan, karna dalam proses pembelajaran peserta didik ditanamkan berbagai nilai-nilai, baik itu kenegaraan, keagamaan, kebudayaan, keterampilan dan lain-lain. Hasil dari berbagai proses pembelajaran tersebut akan membentuk potensi dan karakter peserta didik yang bermutu, dan dengan terlahirnya peserta didik yang bermutu secara tidak langsung akan membentuk pendidikan yang bermutu pula.

Mutu pendidikan menjadi orientasi dalam penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh pemangku pendidikan. Baik itu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga organisasi penyelenggara pendidikan, dan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting ketika masih banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan yang tidak bermutu. Berbagai program dan upaya dalam peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah namun belum juga mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut (KBBI, 1991) mutu merupakan ukuran baik buruknya suatu benda, kadar, taraf, atau derajat berupa: kepandaian, kecerdasan, kecakapan, dan sebagainya. Mutu dibagi kedalam dua perspektif yakni mutu absolut dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau bersifat mutlak. Absolut juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang ditentukan secara sepihak, yakni oleh produsen dalam memproduksi barang atau jasa, sedangkan mutu relative diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen (Jaja Jahari, 2013:95).

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan mengenai

penjaminan mutu pendidikan Permendikbud No 28 tahun 2016. Upaya penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan pemerintah diimplementasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP).

Mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Lembaga pendidikan seharusnya menetapkan standar mutu yang tidak hanya dinyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi, tetapi juga harus dilengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas bagaimana mutu dilembaga pendidikan itu direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang jelas (Sri Uchiawati, 2014: 52-53). Dalam proses penetapan mutu lembaga pendidikan perlu melihat faktor-faktor peningkatan mutu dari banyak sisi, dan tidak hanya puas terhadap hasil dari proses pengakuan terakreditasi saja melainkan memiliki motivasi tinggi terhadap peningkatan mutu atau pelampauan mutu dari standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* pasal 91 berisi pernyataan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP (Suharsaputra, 2013: 383-384). Dengan pemenuhan seluruh standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut maka tingkat pendidikan di Indonesia akan semakin bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berdaya saing.

Orientasi terhadap mutu membutuhkan sistem penjaminan mutu agar mutu dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) dalam suatu institusi pendidikan merupakan tuntutan eksternal dan internal. Tuntutan mutu eksternal dan internal tersebut membantu dalam peningkatan penjaminan mutu yang baik. Secara eksternal penjaminan mutu dinamakan SMPE dan secara internal penjaminan mutu dinamakan SMPI.

Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan telah sesuai dengan standar mutu. Dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

(SPME), dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dalam Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Permendikbud No 28 Tahun 2016). Sebelum diadakannya Permendikbud No 28 tahun 2016, lembaga pendidikan lebih dulu mengetahui dan menerapkan TQM di lembaga pendidikannya.

Total Quality Management (TQM) adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas dan fleksibilitas dari keseluruhan organisasi. TQM adalah sistem manajemen yang fokus pada orang yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengeluaran biaya yang rendah. Macdonald (1993:6) menyatakan bahwa” *TQM is therefore a change agent which is aimed at providing a customer-driven organisation*”. TQM adalah agen perubahan yang ditujukan untuk mengarahkan organisasi agar berorientasi pada pelanggan. Dengan demikian semua aktivitas dalam organisasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. *Total Quality Management* tidak bekerja untuk kepentingan orang lain, tetapi fokus pada kepentingan pelanggan. Pemahaman ini tidak hanya diperuntukkan bagi manajer senior saja, melainkan untuk semua orang yang ada dalam organisasi.

Konsep implementasi manajemen mutu terpadu dalam dunia pendidikan adalah institusi pendidikan yang memosisikan dirinya sebagai institusi jasa. Jasa yang diberikan kepada pelanggan merupakan sesuatu yang bermutu dan memberikan kepuasan pada pelanggan/stakeholders. Untuk itu institusi pendidikan membutuhkan suatu sistem manajemen yang mampu memberdayakan institusi agar lebih bermutu.

Keberhasilan penerapan manajemen mutu terpadu di dalam organisasi pendidikan memerlukan komitmen dan kerja sama antar organisasi pendidikan, baik tingkat pusat dan daerah, serta organisasi pendidikan setempat sebagai pihak

yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Jika manajemen mutu terpadu ini diterapkan sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan dunia pendidikan dan masyarakat, maka akan terjadi perubahan yang cukup efektif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional, dengan demikian pemerintah melalui Permendikbud No 28 tahun 2016, mengadakan sistem penjaminan mutu terpadu melalui SPMI di lembaga pendidikan dasar dan menengah (Ahmad Sulaiman, 2016: 20).

Implementasi SPMI di lembaga pendidikan dilakukan dengan mengerahkan seluruh SDM yang ada, mulai dari Stakeolder Tertinggi (kepala Sekolah) hingga peserta didik. Penerapan SPMI pada lembaga pendidikan memodifikasi kembali dari konsep TQM sebagai sistem pengawas agar SPMI benar-benar terselenggara dengan baik. TQM atau dapat dikatakan sebagai perspektif tindakan dalam level makro (keseluruhan organisasi) dapat diwujudkan dengan implementasi SPMI yang merupakan kegiatan control normatif yang lebih menekankan pada koitmen.

Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI) menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu pendidikan. SPMI menciptakan sekolah sebagai organisasi pembelajar dan menciptakan pentingnya budaya mutu. Mutu tidak lagi diposisikan sebagai beban melainkan kebutuhan, bahkan dijadikan sebagai gaya hidup. Mutu pendidikan kini tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan menjadi urusan setiap orang. Setiap warga sekolah diharapkan berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Puspitasari, 2017: 340-341).

Hasil penelitian dalam jurnal Akuntansi Manajemen Pendidikan (Wibowo 2016: 17-32) menjelaskan bahwa hasil Implementasi SPMI dilaksanakan sebagai sebuah keharusan karena mutu pendidikan tidak hanya tergantung pada pemerintah tetapi juga tergantung pada penilaian para pemangku kepentingan. Implementasi SPMI merupakan kegiatan mandiri, sehingga proses penjaminan mutu dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi sendiri. Hal ini sesuai dengan Permendikbud, yang menyatakan bahwa SPMI di sekolah dasar dan menengah dilakukan sepenuhnya oleh lembaga itu sendiri. Implementasi SPMI dalam meningkatkan mutu pendidikan, membutuhkan semangat bekerja lebih baik,

mengembangkan kesadaran untuk membangun budaya mutu. Secara eksternal SPMI dimanfaatkan terkait dengan persiapan dalam menghadapi akreditasi nasional maupun internasional.

Penelitian lain (Eka Mala Nuryahya, 2018), menjelaskan bahwa dalam proses peningkatan mutu yang menjadi faktor utamanya ialah tenaga pendidik dan kependidikan, dimana fokus pencapaian dalam seluruh standar pendidikan yang menjadi acuan fokusnya ialah peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan terlebih dahulu. Pada tahap perencanaan mengacu pada pedoman penulisan yang disusun oleh sekolah. Pada tahap pelaksanaan seluruh civitas akademik melaksanakan dalam enam koordinasi dan pembinaan lainnya dengan baik, sedangkan evaluasi dilakukan oleh kepala sekolah dan tim penjaminan mutu internal, melalui supervise dan audit mutu internal.

Sedangkan dalam jurnal administrasi perkantoran (Muhammad Mauluddin dan Amy Yayuk Sri Rahayu, 2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu program-program dalam peningkatan mutu lebih memfokuskan dalam evaluasi diri sekolah (EDS), yang lebih bersifat internal untuk menilai kinerja sekolah selama satu tahun pelajaran berdasarkan indikator-indikator yang mengacu pada 8 SNP. Proses evaluasi diri sekolah merupakan siklus yang dimulai dari pembentukan tim pengembang sekolah (TPS), pelatihan penggunaan instrument, pelaksanaan EDS di sekolah dan penggunaan hasil sebagai dasar penyusunan RPS/RKS dan RAPBS/RKAS. EDS juga mengacu pada visi misi sekolah, dengan demikian diharapkan kegiatan EDS dapat memperbaiki visi dan misi dalam pencapaian kinerja sekolah sesuai dengan tujuan awal sekolah. Hasil EDS juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan RPS/RKS.

Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), sekitar 40% standar pelayanan minimal (SPM) dan 34% masih di bawah SPM. Hal ini disebabkan karena masih banyak pengelola pendidikan yang tidak mengerti makna standar mutu pendidikan. Selain itu pada umumnya pengelola satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses

pendidikan yang dilaksanakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (Asia, 2017: 47).

SPMI perlu diterapkan di setiap jenjang lembaga pendidikan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pentingnya SPMI dalam proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah agar tercapainya segala aspek dalam seluruh indikator Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini SPMI tidak hanya dijadikan acuan dalam pemenuhan seluruh standar nasional saja tetapi menjadi tolak ukur keberhasilan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah melakukan upaya untuk mempercepat pencapaian standar nasional pendidikan dengan mengeluarkan Permendikbud No 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Agar pelaksanaan SPMI dapat dilakukan oleh satuan pendidikan secara optimal, maka ditunjuk sekolah model untuk melaksanakan penjaminan mutu secara mandiri. Sekolah model ialah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh LPMP untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah di sekitarnya dalam melaksanakan penjaminan mutu. Salah satu sekolah model yang ditetapkan oleh LPMP Kabupaten Bandung Barat adalah SMP Darul Falah Cihampelas.

Studi pendahuluan terhadap SMP Darul Falah, SMP ini terletak di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. SMP Darul Falah dinaungi oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah yang didirikan pada tahun 1985. SMP Darul Falah sendiri disahkan oleh Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Juli 1986 untuk menyelenggarakan sekolah menengah pertama (SMP). Integrasi sistem pendidikan menjadi ciri khas sistem pendidikan di SMP Darul Falah ini. Integrasi sistem pendidikan ditonjolkan pada proses pembelajarannya, yaitu kurikulum pembelajaran tidak hanya mengacu kepada kurikulum nasional yang ditetapkan kementerian pendidikan tetapi dipadupadankan dengan materi ajar kepesantrenan, seperti *Nahwu*, *Sharaf*, *Tauhid*, *Akhlak*, *Dirosah Islamiyah* dan lain-lain.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2018 tersebut, mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Darul Falah, diketahui bahwasannya SMP Darul Falah di percaya oleh LPMP

sebagai Sekolah Model SPMI di Kabupaten Bandung Barat. Dalam proses implementasi SPMI dilakukan beberapa siklus, yang dimulai dengan menganalisis pemetaan mutu yang mengacu pada evaluasi diri sekolah. Setelah melakukan analisis dari delapan Standar Nasional Pendidikan ditemukan empat standar yang perlu diperbaiki, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses dan standar penilaian.

Tiga empat tahun sekali warga SMP Darul Falah yang tergabung dalam Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang berjumlah 25 orang ditambah komite dan pengawas sekolah mengkaji ulang redaksi visi, misi, tujuan sekolah, regulasi tupoksi pengelolaan sekolah dan kurikulum satuan pendidikan. Apabila hasil kajian ulang ditemukan redaksi visi, misi, tujuan sekolah yang kurang relevan lagi dengan situasi pengembangan jaman, maka akan diadakan penyempurnaan kembali.

Budaya mutu menjadi kewajiban bagi setiap satuan pendidikan dan elemennya untuk diimplementasikan, program yang dirasakan langsung oleh SMP Darul Falah saat ini diantaranya ialah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Walaupun program ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun tetapi dampak positifnya sudah dirasakan langsung walaupun belum begitu signifikan. Dengan demikian untuk terselenggaranya budaya mutu yang baik dan konsistennya berbagai program yang berbasis nilai-nilai yang dikembangkan, maka pihak sekolah secara rutin melakukan mentoring evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan di sekolah dan secara terus menerus melakukan pembinaan terhadap seluruh warga sekolah.

Berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh, berkaitan dengan bagaimana proses evaluasi diri sekolah? Apa yang melatar belakangi adanya sekolah model SPMI? Dan bagaimana implementasi SPMI dalam proses peningkatan mutu?

Mengacu pada latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah (Studi Kasus di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka perumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan mutu pendidikan di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal?
2. Bagaimana perencanaan peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal?
3. Bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal?
4. Bagaimana monitoring pelaksanaan peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal?
5. Bagaimana evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal?
6. Bagaimana penetapan strategi mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Pemetaan mutu pendidikan di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Perencanaan peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- c. Pelaksanaan rencana peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

- d. Monitoring pelaksanaan rencana peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- e. Evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
- f. Penetapan strategi mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh mengenai implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu sekolah diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupu praktis yaitu:

- a. Kegunaan teoritis yaitu, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menganalisis persoalan pendidikan serta mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal.
- b. Kegunaan Praktis yaitu dengan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal di lembaga-lembaga pendidikan secara umum maupun khusus.

D. Kerangka Pemikiran

Pendidikan yang bermutu merupakan amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal ini dinyatakan pada pasal 50 ayat 2 yang berbunyi, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan SNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada standar nasional pendidikan maka pemerintah telah menetapkan PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP. SNP terdiri atas: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki lulusan yang dihasilkan. Dalam konteks persekolahan, standar mutu ditetapkan untuk setiap rangkaian kerja dalam keseluruhan proses (Asia 2017, 47). Menurut Feigenbaum (1986: 7) mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dikatakan bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh lembaga (Abdul Hadis 2014, 85).

Grindle menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa yang memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemungkinan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan (Rusdiana 2015, 132).

Implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang di arahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstarnsformasikan keputusan ke dalam istilah oprasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Rohman 2009, 134).

Sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari lembaga yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu, yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Sistem adalah kumpulan atau group dari sub sistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Susanto 2017: 22).

Secara umum dapat dikatakan bahwa penjaminan mutu adalah serangkaian proses sitematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja sebuah organisasi untuk kemudian ditindaklanjuti

dengan program peningkatan mutu. Rangkaian proses tersebut akan terselenggara dengan benar apabila seluruh pemangku kewajiban melaksanakan berbagai program peningkatan mutu dengan konsisten dan mampu berkomitmen.

Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2016: 27).

Penjaminan mutu internal merupakan komponen penting dalam sistem penjaminan mutu. Karna dengan diadakannya penjaminan mutu internal (PMI) organisasi atau lembaga satuan pendidikan akan terbantu dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal (PME). Kegiatan penjaminan mutu internal pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi bahkan melampaui SNP dalam rangkaian pemberian kepuasan kepada internal stekholder seperti peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kegiatan PMI merupakan kegiatan pertanggungjawaban *horisonal atau internal-horizontal accountability* (Simarmata 2015: 58).

Dalam sistem penjaminan mutu internal dilakukan beberapa siklus, yaitu:

1. Pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan, yang dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS).
2. Penyusunan rencana peningkatan mutu, dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama, disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah.
3. Pelaksanaan rencana peningkatan mutu, dilaksanakan meliputi kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran.

4. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun.
5. Penetapan setrategi mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu.

Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan, diharapkan akan terbangun budaya mutu di lembaga satuan pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus, sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2016, 30-33)

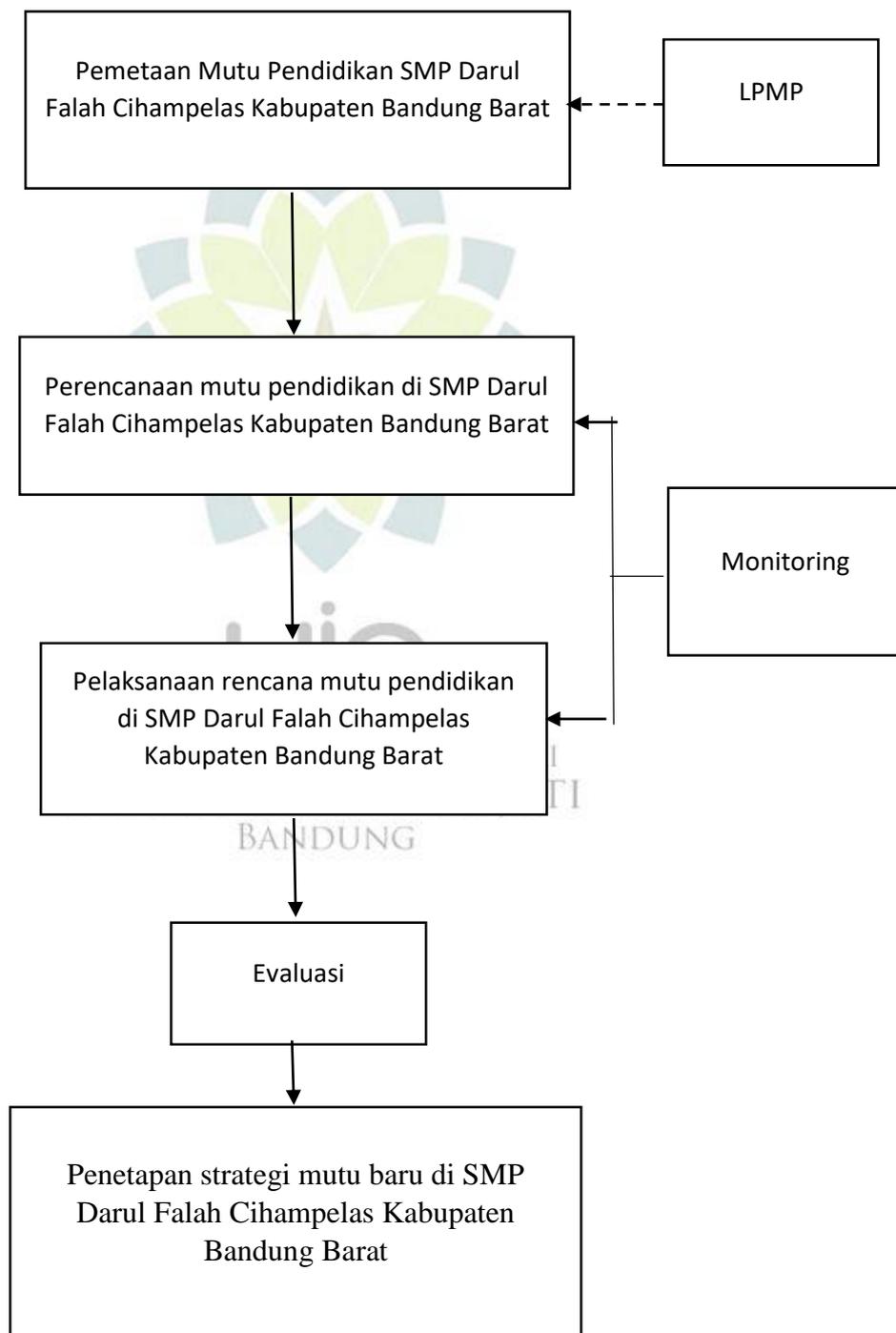


Skema Kerangka Pemikiran

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam Meningkatkan

Mutu Pendidikan Dasar

(penelitian di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat)



E. Hasil Penelitian yang Relevan

Tujuan dari kajian pustaka yaitu menghindari adanya replikasi atau penggandaan yang tidak sengajadan tidak perlu. Oleh karena itu penulis membandingkan penelitian tentang Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Eka Mala Nuryahya (UIN Sunan Ampel Surabaya), dalam skripsinya yang berjudul "*Manajemen Penjaminan Mutu Internal Tenaga Pendidikan dan Kependidikan (studi kasus di SMP Al Hikmah Surabaya)*". Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam Model Manajemen Penjaminan Mutu Internal Tenaga Pendidik dan kependidikan di SMP Al Hikmah Surabaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan rekomendasi berjalan dengan baik. Dalam perencanaan pihak sekolah merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui program yang telah disusun setiap tahunnya bersamaan dengan RKAS dilakukan sebelum awal tahun pelajaran.
2. Uhar Suharsaputra, dalam bukunya yang berjudul "*Administrasi Pendidikan?*".). Pejelasan dalam buku ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam teori, dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk membangun pendidikan berkualitas menuntut perhatian bersama. Berbagai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, pada implementasinya masih terkendala berbagai faktor, dari penanganan yang fragmatis terhadap organisasi pendidikan hingga mutu SDM Pendidikan yang kurang adaptif dan antisipatif terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan dalam upaya menata dan mengelola lembaga pendidikan (sekolah) secara lebih produktif (efektif dan efesien), adaptif dan antisipatif, dengan melibatkan seluruh stakeholder, agar diperoleh hasil yang optimal, sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Nana Syaodih Sukmadiata, dkk. dalam bukunya yang berjudul “*Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (konsep, prinsip, dan instrument)*”. Pejelasan dalam buku ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam teori, dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu upaya yang saat ini tengah ditempuh para pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan model kurikulum yang memfokuskan tujuannya pada penguasaan kemampuan atau kompetensi-komptensi khusus para peserta didik. Kompetensi-kompetensi umum yang dituntut, dikuasai dalam suatu bidang pengajaran, pekerjaan atas tugas, diuraikan menjadi kompetensi khusus atau subkompetensi, dan sub-subkompetensi ini diurai lagi menjadi performansi.
4. Ahmad Suliman, dkk. dalam jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol.4 No.1 April 2016 (17-32). Dengan judul “*Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gajah Mada*”. Pejelasan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam teori bahwa konsep dan kebijakan SPMI di UGM diartikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan penetapan standar, plaksanaan, *monitoring*, evaluasi diri, audit mutu internal, sampai dengan *benchmarking* untuk menentukan standar baru, yang disebut sebagai diklus penjaminan mutu. Pengorganisasian SPMI di UGM dilaksanakan oleh organisasi penjaminan mutu yang diberi nama Kantor Jaminan Mutu (KJM UGM) yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh. Implementasi SPMI di UGM dilaksanakan dengan penyusunan rancangan SPMI yang secara operasional disebut Siklus SPMI yang dilaksanakan mengikuti periode satu tahunan. Siklus SPMI terdiri atas tujuh langkah atau tahap, yaitu: penetapan standar, pelaksanaan, monitoring, evaluasi diri, audit mutu

internal, rumusan koreksi, dan peningkatan mutu untuk kepuasan stakeholders.

5. Ridwan A. Sani, dkk dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Penjaminan Mutu Internal*”. Pejelasan dalam buku ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam teori bahwa konsep SPMI harus difahami oleh seluruh pemangku pendidikan untuk dapan mengimplementasikan SPMI secara efektif dan efesien. Pemetaan mutu yang dilakukan oleh satuan pendiidkan dimulai dari evaluasi diri sekolah (EDS), yang selanjutnya dilakukan perencanaan, pengimplementasian, monitoring dan evaluasi, hingga penetapan mutu untuk proses peningkatan mutu selanjutnya. Dengan demikian penjaminan mutu akan terus berjalan secara continue. Dalam SPMI penetapan standar mutu diperlukan untuk dapat menetapkan kesepakatan pandangan mengenai mutu sebuah proses atau produk. Acuan penetapan mutu dalam hal ini mengacu kepada standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Lembaga satuan pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila telah memenuhi acuan mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Badrudin, dalam laporan penelitiannya yang berjudul “*Manajemen Mutu Terpadu ada Pendidikan Tinggi Islam (Studi Mutu Terpadu Program Studi Manajemen Pendidikan di Tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri: UIN Bandung UIN Yogyakarta, UIN Jakarta)*”, pembahasan dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam strategi peningkatan mutu yang diarahkan pada 1) visi, misi, tujuan dan indicator prodi bermutu, 2) kebijakan prodi tentang peningkatan mutu, 3) strategi pencapaian program bermutu, 4) *Capacity Building*, 5) kepemimpinan mutu, 6) prespektif pengembangan mutu prodi kedepan. Dengan hasil penelitian yang menjadi objek penelitian mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas sehingga mampu menjadikan prodi yang unggul dan bermutu.

7. Wia Adawiyah M. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dalam skripsinya yang berjudul “*Manajemen Peningkatan Mutu Madrasah (penelitian di Madrasah Tsanawiyah Al-Mukhlisin Bojongsoang Bandung)*”. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam teori yang digunakan, teori dalam penelitian ini adalah perencanaan mutu, pengendalian mutu dan perbaikan mutu. Hasil dari penelitian ini dalam proses perencanaan mutu dilakukan beberapa tahap dimulai dari analisis asar, analisis SWOT, perencanaan operasional, dan penentuan kebijakan standar mutu. Kedua dalam pengendalian mutu dilakukan dengan beberapa tahapan merancang struktur kerja, penilaian serta pemeriksaan rutin yang dilakukan dengan mengidentifikasi area yang perlu dilakukan perbaikan, mengembangkan infrastruktur, memfasilitasi tim kerja dan evaluasi.
8. Muhammad Mauluddin dan Amy Yayuk Sri Rahayu (Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI), dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) di SDN Cilandak Timur 08 Pagi Jakarta Selatan*”. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dalam teori yang digunakan, teori dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang dilakukan dalam proses peningkatan mutu hanya berfokus pada evaluasi diri sekolah (EDS). Tahapan dalam pelaksanaan EDS yaitu: 1) *Copacity Building*, 2) *Supervisi Implementasi*, 3) *Instrumen Angket*.
9. Burhanudin, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) dalam skripsinya yang berjudul “*Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah (penelitian di SMP Plus Al-Aqsha Sumedang)*”. Skripsi ini memiliki keterkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti hanya saja berbeda dengan teori yang digunakan, teori dalam penelitian ini adalah perencanaan peningkatan mutu dilakukan dengan menganalisis kebutuhan pasar dan perumusan visi, misi, dan tujuan. Pengendalian peningkatan mutu dilakukan dengan pembentukan SPI (satuan

pengawa internal). Perbaikan peningkatan mutu dilakukan melalui identifikasi dan evaluasi yang dilakukan setiap akhir semester.

